STRATEGI DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM PENGEMBANGAN UMKM PEMPEK DI KOTA PALEMBANG

Denzel Trinda Maheswara
NPP. 33.0222
Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
Email : denzeltrinda1@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Ir. Dyah Poespita E, MP
Email : dyahpe@ipdn.ac.id

ABSTRACK

Problem (GAP): *Pempek is a leading culinary product and cultural icon of Palembang City with significant economic potential that ideally should be supported by optimal local government intervention. However, in reality, this expected condition has not been fully achieved because pempek MSME actors still face various challenges in developing their businesses.* ***Objective:*** *The purpose of this study is to analyze the strategy of the Department of Cooperatives and SMEs of Palembang City in developing pempek.* ***Method:*** *This study uses a descriptive qualitative method. Data collection techniques were conducted through interviews, observation, and documentation.* ***Results/Findings:*** *The findings obtained in this study indicate that the Department already possesses strengths in the form of coaching programs such as HACCP standardization training, production equipment assistance, and marketing facilitation. However, this program is not yet optimal due to the limited number of mentoring human resources (HR) and budget constraints. At the strategy formulation stage, the existing vision is still general and not specific to the pempek sector. At the implementation stage, coordination among stakeholders still needs improvement, while at the evaluation stage, the program tends to be administrative and lacks a focus on sustainability (hand-holding).* ***Conclusion:*** *The strategy of the Department of Cooperatives and SMEs of Palembang City in developing pempek MSMEs has not been implemented optimally due to constraints in budget limitations, mentoring HR, and program evaluations that have not focused on sustainability. To optimize MSME development, it is recommended that the Department increase the ratio of mentoring staff and implement a sustainable business incubation system so that pempek MSMEs can scale up independently.*

Keywords: *Strategy; Department of Cooperatives and SMEs; Pempek MSMEs; Development*

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Pempek merupakan produk kuliner unggulan dan ikon budaya Kota Palembang yang memiliki potensi ekonomi besar yang idealnya didukung oleh intervensi pemerintah daerah secara optimal. Namun pada kenyataannya, kondisi yang diharapkan tersebut belum sepenuhnya tercapai karena pelaku UMKM pempek masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangan usahanya. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang dalam pengembangan UMKM pempek. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu Dinas telah memiliki kekuatan berupa program pembinaan seperti pelatihan standardisasi HACCP, bantuan peralatan produksi, serta fasilitasi pemasaran. Namun, program ini belum maksimal karena terkendala keterbatasan jumlah SDM pendamping dan anggaran. Pada tahap perumusan strategi, visi yang ada masih bersifat umum dan belum spesifik pada sektor pempek. Pada tahap implementasi, koordinasi antar *stakeholder* masih perlu ditingkatkan, sedangkan pada tahap evaluasi program cenderung bersifat administratif dan kurang menyentuh aspek keberlanjutan (*hand-holding*). **Kesimpulan:** Strategi Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang dalam pengembangan UMKM pempek belum berjalan secara maksimal akibat adanya kendala pada keterbatasan anggaran, SDM pendamping, dan evaluasi program yang belum berfokus pada keberlanjutan. Guna mengoptimalkan pengembangan UMKM, disarankan agar Dinas meningkatkan rasio tenaga pendamping dan menerapkan sistem inkubasi bisnis yang berkelanjutan agar UMKM pempek dapat naik kelas secara mandiri.
Kata kunci: Strategi; Dinas Koperasi dan UKM; UMKM Pempek; Pengembangan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi nasional karena memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan pendapatan masyarakat (Ernawati, 2019). Dalam dinamika ekonomi makro, UMKM tidak hanya memegang peran sebagai penyangga (*safety net*) ekonomi nasional ketika terjadi krisis, tetapi juga bertransformasi menjadi instrumen penting dalam mendorong pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal (Arsyad, 2010). Eksistensi ini diperkuat oleh fakta empiris bahwa kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia mencapai lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta mampu menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja di Indonesia. Signifikansi angka tersebut menegaskan bahwa penguatan sektor kosmos usaha kecil merupakan prasyarat mutlak dalam mewujudkan struktur

perekonomian nasional yang tangguh, inklusif, dan berkeadilan.

Dalam konteks pembangunan daerah di era otonomi, orientasi pengembangan UMKM berbasis potensi lokal menjadi strategi yang sangat krusial untuk meningkatkan daya saing ekonomi wilayah (Kuncoro, 2004). Pembangunan ekonomi yang efektif tidak lagi bersifat sentralistik, melainkan bertumpu pada kemampuan daerah dalam mengoptimalkan keunggulan komparatifnya menjadi keunggulan kompetitif.

Kota Palembang memiliki salah satu potensi unggulan berupa industri kuliner khas daerah yang legendaris, yaitu pempek. Pempek saat ini bukan sekadar komoditas makanan tradisional pengisi pasar domestik, melainkan telah bermutasi menjadi identitas budaya (*cultural icon*) sekaligus produk ekonomi unggulan daerah yang berkontribusi nyata terhadap perputaran roda ekonomi masyarakat setempat. Berbagai data empiris menunjukkan bahwa sektor UMKM pempek memberikan kontribusi signifikan, yakni berkisar antara 7–10% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palembang, khususnya melalui klaster sektor industri pengolahan pangan (Oktaria, Hidayat, & Saputra, 2025). Angka kontribusi ini mencerminkan bahwa ekosistem usaha pempek adalah salah satu motor penggerak ekonomi kerakyatan yang substansial di tingkat lokal.

Prospek dan potensi pengembangan UMKM pempek di Kota Palembang pada dasarnya masih sangat terbuka lebar. Tren permintaan pasar terhadap produk olahan ikan ini menunjukkan eskalasi yang positif, baik dari ceruk pasar masyarakat lokal maupun dari arus kunjungan wisatawan domestik serta mancanegara. Momentum pertumbuhan ini semakin diakselerasi oleh gelombang disrupsi teknologi melalui perkembangan pemasaran digital. Aspek digitalisasi ini membuka pintu peluang pasar tanpa batas geografis (*borderless market*) bagi pelaku UMKM untuk mengekspansi skala pemasarannya, baik di tingkat nasional maupun internasional (Aliyah, 2025). Menyadari peluang strategis tersebut, pemerintah daerah pun semakin aktif mengintervensi ekosistem usaha ini dengan melibatkan para pelaku usaha ke dalam berbagai skema program pembinaan, mulai dari pelatihan pemasaran digital, fasilitasi standardisasi produk, hingga promosi wisata kuliner daerah yang masif.

Namun demikian, di balik besarnya potensi ekonomi dan peluang pasar yang tersedia, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kompleksitas permasalahan yang menghambat akselerasi pengembangan UMKM pempek tersebut. Hambatan-hambatan klasik dan struktural yang kerap dihadapi oleh para pelaku usaha meliputi keterbatasan akses permodalan formal, rendahnya adopsi teknologi digital, lemahnya tata kelola kapasitas manajerial usaha, serta tensi persaingan usaha yang semakin ketat (Sudaryanto & Hanim, 2002). Mayoritas pelaku UMKM pempek masih terjebak pada penggunaan metode pemasaran konvensional dan belum mampu mengeksploitasi platform digital secara optimal untuk memperluas pangsa pasar. Akar dari permasalahan ini umumnya bermuara pada rendahnya tingkat literasi digital pelaku usaha serta keterbatasan kualitas sumber daya manusia internal yang menjadi faktor determinan penghambat proses adopsi inovasi teknologi (Astuti, 2019).

Ditinjau dari perspektif administrasi publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Koperasi

dan UKM memegang peran sentral sebagai *leading sector* yang mengemban fungsi regulator, fasilitator, sekaligus katalisator pembangunan ekonomi lokal (Sedarmayanti, 2009). Institusi ini telah berupaya mengimplementasikan mandatnya melalui ragam program pemberdayaan, seperti penyelenggaraan pelatihan manajemen usaha, pendampingan intensif pemasaran digital, hingga fasilitasi akses pembiayaan.

Akan tetapi, efektivitas eksekusi dari program-program pemberdayaan tersebut dinilai masih belum mencapai titik optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa celah implementasi kebijakan, di antaranya keterbatasan jangkauan dan cakupan program yang belum merata, pendekatan program yang cenderung bersifat *top-down*, serta rapuhnya sistem monitoring dan evaluasi yang dijalankan. Pola pembinaan yang bersifat parsial ini berisiko membuat program berjalan kurang menyentuh aspek keberlanjutan (*hand-holding*) yang membimbing pelaku usaha hingga benar-benar mandiri.

Berpijak pada realitas dan dinamika problematik di atas, diperlukan reformulasi strategi yang sistematis, komprehensif, dan terarah dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang (Ndraha, 2003). Intervensi strategi yang tepat sangat dibutuhkan agar desain pengembangan UMKM pempek dapat berjalan secara optimal, berkelanjutan, dan secara langsung implikatif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian yang mengkaji secara mendalam mengenai *"Strategi Dinas Koperasi dan UKM dalam Pengembangan UMKM Pempek di Kota Palembang"* menjadi studi yang sangat mendesak dan penting untuk dilaksanakan.

Dengan menggunakan pisau analisis manajemen strategis model Wheelen dan Hunger, yang membedah organisasi melalui empat pilar utama, yaitu pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian (Wheelen & Hunger, 2012). Penelitian ini diharapkan mampu menyajikan potret komprehensif serta menyusun rekomendasi kebijakan yang aplikatif. Reorientasi strategi ini menjadi pijakan dasar agar program kerja pemerintah tidak lagi sekadar menjadi rutinitas sektoral, melainkan menjelma sebagai kebijakan publik yang mampu menaikkelaskan UMKM pempek menjadi entitas usaha yang berdaya saing tinggi di era ekonomi digital.

1.2 Kesenjangan Masalah (Research Gap)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan upaya pembinaan dan pengembangan UMKM pempek di Kota Palembang ini. Faktor keterbatasan modal dan rendahnya literasi manajerial merupakan salah satunya. Cukup banyak pelaku UMKM di Kota Palembang yang usahanya stagnan atau tidak berkembang skalanya dengan berbagai sebab, salah satunya lebih memilih untuk bertahan pada metode konvensional karena terbatasnya kemampuan finansial keluarga dan rumitnya akses kredit perbankan formal. Hal ini sejalan dengan data BPS Kota Palembang yang mencatat bahwa masih terdapat sekitar 125.000 jiwa (7,8%) penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, di mana sebagian besar dari mereka terpaksa bekerja di sektor informal, termasuk sebagai pelaku usaha mikro yang terbatas. Data ini menunjukkan bahwa banyaknya masyarakat yang menjalankan usahanya sekadar untuk bertahan hidup (subsisten) ketimbang

berwirausaha secara inovatif untuk "naik kelas". Padahal, dalam mengembangkan perekonomian suatu wilayah dibutuhkan peran UMKM yang berdaya saing guna mengekspansi potensi daerah serta membantu pemerintah dalam melaksanakan target pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.

Kurangnya kesadaran kolaboratif dan inovatif untuk bersama-sama membangun daya saing daerah menjadi permasalahan berikutnya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sebagian generasi penerus kerap lebih memilih bekerja di sektor formal dibandingkan harus meneruskan dan membesarkan usaha kuliner warisan keluarga. Masyarakat usia produktif lebih cenderung memilih mencari pekerjaan sebagai karyawan perusahaan daripada harus merintis kemandirian dari bawah menghadapi kerasnya iklim usaha. Hal ini menunjukkan kurangnya kepedulian beberapa pihak untuk bahu-membahu membangun ekosistem kuliner lokal secara mandiri, dengan sering kali menyerahkan begitu saja peran pembinaan dan penyelesaian masalah UMKM kepada pemerintah daerah (Dinas Koperasi dan UKM) setempat.

Meskipun budaya memproduksi dan mengonsumsi pempek telah mengakar kuat sebagai identitas masyarakat sejak zaman Kesultanan Palembang Darussalam, dorongan untuk mencari keamanan finansial di sektor lain tetap menjadi hal yang menggiurkan. Tidak dapat disalahkan jika sebagian masyarakat lebih memilih pekerjaan formal dengan iming-iming lebih mudah memperoleh pendapatan yang stabil dan prestise sosial, ketimbang harus terikat di sektor tradisional yang selalu dihantui oleh fluktuasi harga bahan baku (ikan) serta ketatnya persaingan dari produk pabrikan besar. Selanjutnya, fenomena yang terjadi pada para pelaku usaha di era persaingan bebas ini yakni cenderung individualistis dalam mempertahankan usahanya, terlihat dari semangat koordinasi antar-*stakeholder* yang masih lemah dan efektivitas jangkauan program pembinaan gotong-royong dari dinas yang peminat dan pelaksanaannya belum merata ke seluruh lapisan UMKM.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian ini sangat penting dilakukan karena eskalasi pengembangan UMKM pempek pada hakikatnya melampaui batas kalkulasi ekonomi semata. Pembangunan ekonomi daerah tidak hanya berorientasi pada pencapaian angka pertumbuhan, melainkan harus terintegrasi dengan pemerataan hasil-hasil pembangunan (Kartasasmita, 1996). Oleh karena itu, pengembangan sektor usaha kuliner lokal ini merupakan manifestasi dari upaya strategis dalam memperkuat identitas budaya daerah (*cultural heritage*), menekan disparitas sosial melalui pengentasan kemiskinan, serta mendongkrak taraf kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkeadilan (Todaro & Smith, 2006).

Dari perspektif akademis dan tata kelola pemerintahan, penelitian ini memegang urgensi yang krusial sebagai landasan empiris (*empirical evidence*) yang komprehensif. Kajian ini diperlukan untuk membedah dan memahami secara holistik anatomi strategi yang saat ini diimplementasikan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang, mulai dari tahap perumusan hingga evaluasi (Wheelen & Hunger, 2012). Melalui analisis yang sistematis, penelitian ini akan mampu mengidentifikasi secara presisi determinan apa saja yang bertindak sebagai faktor

katalisator (pendukung) maupun *bottleneck* (penghambat) dalam proses eksekusi kebijakan di lapangan, sehingga pemerintah dapat melakukan intervensi yang terukur (Ndraha, 2003).

Konsekuensi logis apabila kajian analitis ini diabaikan adalah birokrasi pemerintah daerah berpotensi mengalami defisit data empiris yang valid sebagai navigasi dalam merumuskan desain kebijakan. Tanpa adanya potret kondisi riil di lapangan, kebijakan pengembangan UMKM berisiko menjadi tidak tepat sasaran (*miss-targeted*). Akibatnya, alokasi anggaran dan program pemberdayaan masyarakat yang digulirkan berpotensi mengalami kegagalan implementasi, tidak sinkron dengan akar kebutuhan (*need assessment*) para pelaku usaha di tingkat akar rumput, dan pada akhirnya menjadi program yang kurang memberikan daya ungkit nyata terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat (Sumodiningrat, 1999).

Lebih jauh lagi, di tengah era disrupsi inovasi saat ini, sebuah keunggulan komparatif lokal dituntut untuk mampu bertransformasi menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan (*sustainable competitive advantage*) (Porter, 1985). Tanpa adanya cetak biru (*blueprint*) strategi pembinaan yang adaptif, komprehensif, dan visioner dari pemerintah, terdapat kekhawatiran besar bahwa potensi raksasa UMKM pempek sebagai ikon ekonomi Kota Palembang akan mengalami stagnasi. Jika tidak didukung oleh instrumen pemberdayaan yang relevan, pelaku usaha lokal dapat kehilangan daya saingnya secara perlahan, tergerus oleh gempuran kompetitor luar, dan tertinggal dalam pusaran ekonomi digital yang senantiasa menuntut literasi, inovasi, dan adopsi teknologi yang mumpuni (Aliyah, 2025; Astuti, 2019).

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini disusun dengan berpijak pada fondasi literatur dan terinspirasi oleh berbagai penelitian terdahulu yang mengkaji ekosistem UMKM pempek serta korelasinya dengan pembangunan ekonomi daerah. Secara akademik, sektor UMKM kuliner khas ini telah banyak menarik perhatian para peneliti karena posisinya yang sangat krusial dalam menyokong perekonomian akar rumput masyarakat.

Dalam ranah ekonomi makro, penelitian yang dilakukan oleh Oktaria, Hidayat, dan Saputra (2025) telah membedah secara spesifik mengenai dampak UMKM pempek terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kota Palembang dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kajian tersebut memvalidasi bahwa UMKM pempek memiliki kontribusi yang sangat signifikan sebagai urat nadi penggerak ekonomi daerah. Akan tetapi, di balik besarnya kontribusi tersebut, ditemukan sebuah paradoks di mana para pelaku usaha masih terkekang oleh tantangan klasik, yakni rapuhnya struktur modal dan lambatnya laju inovasi produk yang berpotensi menghambat eskalasi bisnis secara agregat.

Pada level analisis mikro dan taktikal operasional, beberapa literatur memfokuskan pembahasannya pada strategi bertahan di pasar bebas. Studi kasus dari Ramadani dkk. (2025) mengkaji model pemberdayaan pada UMKM Pempek Kiyya, dengan menitikberatkan pada urgensi penguatan media promosi visual dan pengembangan identitas merek (*brand identity*) sebagai instrumen vital untuk memperluas penetrasi pasar. Sejalan dengan hal tersebut, studi dari Muhamad dan

Hardini (2025) mengeksplorasi strategi pemasaran defensif yang diterapkan oleh Pempek Cek Ya. Penelitian ini membuktikan bahwa konsistensi dalam menjaga kualitas usaha menjadi senjata utama yang tidak bisa ditawar demi mempertahankan loyalitas konsumen dan daya saing di tengah kompetisi pasar UMKM yang semakin ketat.

Lebih lanjut mengenai adaptasi disrupsi teknologi, riset dari Aliyah (2025) berhasil menyoroti pentingnya diversifikasi produk bernilai tambah tinggi, seperti inovasi pempek rajungan, yang dikelola melalui optimalisasi peran manajemen strategik berbasis instrumen digital. Kajian ini menegaskan bahwa adopsi manajemen digital bukan lagi sebuah pilihan pelengkap, melainkan prasyarat mutlak dalam rantai nilai pengembangan produk dan pemasaran saat ini.

Dari sudut pandang efektivitas kebijakan afirmatif, kajian oleh Dhanti, Rahman, dan Yusuf (2023) menawarkan perspektif alternatif dengan mengevaluasi program bantuan pemerintah terhadap pelaku UMKM pempek menggunakan pisau analisis filosofis *maqashid syariah*. Penelitian tersebut menilik sejauh mana intervensi bantuan material dari pemerintah mampu memberikan asas kemanfaatan universal (*maslahah*) yang berdampak pada perlindungan dan keberlangsungan hajat hidup pelaku usaha kecil.

Berdasarkan sintesis dari berbagai literatur terdahulu, dapat ditarik konklusi bahwa fokus kajian akademik selama ini masih cenderung terfragmentasi pada sub-sektor tertentu. Secara umum, diskursus yang telah ada lebih menitikberatkan analisisnya pada ranah hilir, seperti efisiensi aspek pemasaran, pemanfaatan bantuan pemerintah secara parsial, serta kalkulasi dampak langsung ekonomi UMKM pempek secara makro.

Sementara itu, penelitian ini hadir untuk menjembatani kesenjangan analisis tersebut dengan mengambil sudut pandang pendekatan kelembagaan institusi publik secara komprehensif. Alih-alih menjadikan UMKM sebagai subjek evaluasi tunggal, penelitian ini meletakkan "dapur" pembuat kebijakan, yakni Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang, sebagai episentrum analisis. Dengan mengaplikasikan siklus utuh manajemen strategis, penelitian ini membedah arsitektur kebijakan birokrasi mulai dari fase pengamatan lingkungan, perumusan strategi, eksekusi implementasi, hingga tahapan evaluasi secara sirkular. Pendekatan ini menawarkan wawasan empiris baru mengenai sejauh mana orkestrasi pemerintah daerah mampu berfungsi sebagai katalisator sejati dalam pemberdayaan UMKM lokal.

1.5 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan atau orisinalitas yang membedakannya secara tegas dan signifikan dengan rentetan kajian penelitian sebelumnya. Nilai kebaharuan tersebut dapat ditelaah secara mendalam melalui tiga aspek fundamental berikut, yang sekaligus mengonfirmasi posisi penelitian ini di tengah peta akademik (*state of the art*).

Secara empiris dan kebijakan, penelitian ini secara khusus meletakkan fokus kajiannya pada strategi intervensi institusi pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang, terkait pengembangan UMKM pempek sebagai representasi produk ekonomi unggulan daerah. Jika sebagian

besar literatur terdahulu memposisikan UMKM semata-mata sebagai entitas bisnis individual dalam bertahan di pasar, penelitian ini menggeser episentrum analisisnya. Kajian ini secara spesifik menyoroti institusi publik sebagai aktor utama (*leading sector*) yang mengorkestrasi pembangunan ekonomi lokal, serta menganalisis bagaimana birokrasi meramu dan menerjemahkan mandat kebijakannya ke dalam aksi pendampingan yang konkret dari hulu ke hilir.

Evidensi Perbedaan: Fokus kebijakan ini kontras dengan penelitian Oktaria et al. (2025) yang menyoroti peluang dan tantangan UMKM pempek secara umum serta dampaknya terhadap pertumbuhan PDRB makro tanpa membedah intervensi kebijakan birokrasi. Penelitian ini juga berbeda secara substansial dengan kajian Dhanti et al. (2023); meskipun sama-sama menyinggung peran pemerintah, kajian mereka membatasi cakupan kebijakan secara parsial hanya pada evaluasi program dana bantuan finansial, sedangkan penelitian ini menganalisis kebijakan tata kelola pembinaan yang bersifat menyeluruh (*holistic governance*).

Secara metodologis dan teoretis, keunggulan kebaharuan penelitian ini terletak pada penggunaan pisau bedah analisis yang terstruktur, yakni pendekatan teori manajemen strategi dari Wheelen dan Hunger (Wheelen & Hunger, 2012). Penggunaan teori ini menawarkan kerangka kerja (*framework*) analisis organisasi yang utuh dan tidak parsial melalui empat tahapan siklus strategis yang saling berkesinambungan: pengamatan lingkungan (*environmental scanning*), perumusan strategi (*strategy formulation*), implementasi strategi (*strategy implementation*), hingga evaluasi dan pengendalian (*evaluation and control*).

Evidensi Perbedaan: Dari aspek Teori, pendekatan ini membedakannya dengan penelitian Muhamad & Hardini (2025) yang murni menggunakan teori bauran pemasaran (*marketing mix*) konvensional tingkat mikro untuk kelangsungan usaha individual. Kerangka kerja ini juga berbeda dari penelitian Aliyah (2025); meski sama-sama mengadopsi kacamata manajemen strategis, Aliyah memfokuskan teorinya pada ranah manajemen digitalisasi bisnis internal pelaku usaha, bukan siklus manajemen strategi instansi pemerintahan. Sementara dari aspek Metode, penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif instraspesifik birokrasi, yang membedakannya secara fundamental dengan kajian Ramadani et al. (2025) yang menggunakan desain penelitian pengabdian masyarakat (*action research*) berbasis pendampingan teknis.

Dari aspek konseptual dan karakteristik objek, penelitian ini melakukan terobosan dengan mengintegrasikan tiga perspektif studi secara multidisipliner dalam membedah fenomena pengembangan UMKM pempek. Kajian ini memadukan secara koheren antara konsepsi pembangunan ekonomi daerah (Arsyad, 2010; Kuncoro, 2004), teori pemberdayaan masyarakat yang bertujuan memandirikan pelaku usaha di akar rumput secara partisipatif (Sumodiningrat, 1999), serta prinsip-prinsip *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik dalam eksekusi kebijakan birokrasi (Sedarmayanti, 2009).

Evidensi Perbedaan: Karakteristik objek dalam penelitian ini bersifat institusional meso-makro (Klaster kebijakan Dinas Koperasi & UKM Kota Palembang). Karakteristik ini membedakannya secara tegas dengan penelitian Ramadani et al. (2025) (studi kasus pada Pempek Kiyya) serta Muhamad &

Hardini (2025) (studi kasus pada Pempek Cek Ya) yang menjadikan entitas bisnis tunggal swasta berskala mikro (*single-case private enterprise*) sebagai objeknya. Selain itu, karakteristik wilayah perkotaan (Kota Palembang) sebagai daerah asal ikon budaya ini juga membedakan objek penelitian ini dengan kajian Aliyah (2025) yang meneliti komoditas substitusi (*Pempek Rajungan*) dengan karakteristik objek di wilayah perdesaan pesisir (Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang). Dari sisi teori konseptual, peleburan tiga domain ilmu pada penelitian ini juga berbeda dengan pendekatan Dhanti et al. (2023) yang mengandalkan perspektif teologis-ekonomis (*Maqashid Syariah*). Ringkasan Matriks Diferensiasi (*Research Gap*):

a. Oktaria et al. (2025): Meneliti dampak ekonomi makro; penelitian ini meneliti tata kelola kebijakan publik (*government intervention*).
b. Ramadani et al. (2025): Menggunakan metode pengabdian masyarakat pada satu objek usaha mikro (Pempek Kiyya); penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif pada institusi pembina daerah.
c. Muhamad & Hardini (2025): Berfokus pada teori pemasaran mikro usaha (Pempek Cek Ya); penelitian ini menggunakan Teori Manajemen Strategis organisasi publik.
d. Aliyah (2025): Mengkaji manajemen strategik digital pelaku usaha mandiri pempek rajungan di perdesaan Karawang; penelitian ini mengkaji siklus manajemen strategis kedinasan di pusat kota pempek (Palembang).
e. Dhanti et al. (2023): Menggunakan kacamata teori Maqashid Syariah untuk bantuan dana; penelitian ini menggunakan integrasi *Good Governance*, Pemberdayaan, dan Pembangunan Ekonomi Daerah untuk keseluruhan program kedinasan.

Berdasarkan argumentasi di atas, kombinasi dari spesifisitas objek pemerintahan, kelengkapan alat analisis siklus strategi Wheelen & Hunger, serta kekayaan integrasi teoretis tersebut menjadikan penelitian ini valid menghadirkan sudut pandang baru (*new insight*) sebagai cetak biru ilmiah dalam mengevaluasi bagaimana pemerintah daerah seharusnya merancang strategi yang adaptif dan holistik untuk mengembangkan UMKM berbasis pelestarian potensi lokal.

1.6 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai strategi Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang dalam pengembangan UMKM pempek di Kota Palembang.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan rancangan desain riset dengan pendekatan kualitatif deskriptif (Moleong, 2017; Creswell, 2018). Pemilihan metode penelitian kualitatif ini diputuskan secara sengaja karena penelitian ini mengusung tujuan fundamental untuk membedah, mengeksplorasi, dan memahami secara mendalam strategi institusional yang diterapkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang dalam kerangka pengembangan UMKM pempek. Pendekatan kualitatif dinilai sebagai instrumen metodologis yang paling koheren dan tepat, mengingat fokus kajian ini bermuara

pada upaya untuk menggali informasi secara komprehensif mengenai fenomena sosial yang dinamis, proses formulasi kebijakan, serta dialektika pelaksanaan strategi di lapangan yang mustahil diukur secara kaku hanya dengan mengandalkan instrumen angka statistik (Creswell, 2018). Melalui paradigma kualitatif ini, peneliti diberikan keleluasaan untuk memperoleh pemahaman empatik dan kontekstual mengenai implementasi strategi pengembangan UMKM yang bersumber langsung dari konstruksi pengalaman para aktor kebijakan dan pelaku usaha di ekosistem aslinya.

Proses pengumpulan data lapangan diorkestrasi melalui kombinasi teknik yang ketat, yakni wawancara mendalam (in-depth interview), observasi partisipatif, penelusuran dokumentasi, dan studi kepustakaan yang relevan (Sugiyono, 2013). Pemilihan subjek informan tidak dilakukan secara acak, melainkan menggunakan teknik purposive sampling (Sugiyono, 2013). Teknik penarikan sampel bertujuan ini diaplikasikan dengan pertimbangan logis bahwa tidak semua entitas birokrasi maupun masyarakat memiliki kompetensi, rekam jejak historis, serta informasi yang relevan mengenai seluk-beluk arah strategi pengembangan UMKM pempek di Kota Palembang.

Kriteria pemilihan informan didasarkan pada parameter tingkat signifikansi keterlibatan, domain kewenangan regulasi, dan kedalaman pemahaman terhadap ekosistem program pemberdayaan. Sebagai episentrum informasi birokrasi, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang ditetapkan sebagai informan kunci (*key informant*). Hal ini didasari oleh posisi sentralnya yang melekat dengan kewenangan strategis tertinggi dalam merumuskan arah kebijakan, perencanaan tata kelola program, serta pengawasan eksekusi pemberdayaan UMKM secara teritorial. Guna memperluas spektrum informasi dan menghindari bias perspektif tunggal penguasa kebijakan, penelitian ini wajib melibatkan lapis informan pendukung strategis. Elemen ini mencakup Kepala Bidang UMKM, staf teknis pelaksana program pemberdayaan, jajaran pengurus organisasi agregator seperti ASPPEK (Asosiasi Pengusaha Pempek Palembang), serta pelaku UMKM pempek akar rumput sebagai representasi penerima manfaat riil dari program pemerintah. Orkestrasi kombinasi silang informan ini dirancang secara sistematis agar peneliti mampu mengonstruksi gambaran realitas kebijakan yang utuh, mempertemukan perspektif dari ruang konseptual perumus kebijakan (*top-level*), ruang operasional pelaksana teknis (*mid-level*), hingga ruang empiris pelaku usaha sebagai sasaran kebijakan (*grassroots*).

Guna menjamin derajat kepercayaan dan rigoritas ilmiah dari konklusi kualitatif, teknik pengujian keabsahan data dieksekusi secara ketat melalui empat pilar utama validitas kualitatif: uji kredibilitas (*credibility*), transferabilitas *transferability*), dependabilitas (*dependability*), dan konfirmabilitas (*confirmability*) (Sugiyono, 2013). Kredibilitas data dikawal melalui mekanisme triangulasi sumber secara berlapis, yaitu menyilangkan dan membandingkan akurasi informasi yang diklaim oleh narasi pemerintah daerah dengan realitas yang dialami oleh pelaku UMKM serta kesaksian organisasi pendukung independen. Lapisan pertahanan data berikutnya adalah triangulasi teknik, di mana data mentah hasil wawancara dikalibrasi ulang tingkat kebenarannya dengan membandingkannya terhadap catatan observasi partisipatif lapangan dan silang-

periksa dokumen resmi kelembagaan. Peneliti juga melembagakan proses *member check*, yakni mekanisme proaktif untuk mengonfirmasi ulang draf transkrip hasil temuan kepada sang informan. Tujuannya murni untuk memvalidasi bahwa konstruksi narasi yang dibangun peneliti benar-benar mencerminkan realitas esensial yang dimaksudkan oleh informan tanpa adanya distorsi interpretasi. Sementara itu, instrumen uji dependabilitas dan konfirmabilitas direalisasikan melalui mekanisme audit rekam jejak penelitian (*audit trail*) secara komprehensif, agar seluruh alur kerangka berpikir dan proses pengolahan data penelitian ini dapat ditelusuri ulang (*traceable*) dan dipertanggungjawabkan derajat objektivitasnya kepada komunitas akademik (Creswell, 2018).

Konstruksi makna dari lautan abstraksi data kualitatif lapangan diproses secara berkesinambungan menggunakan model analisis data interaktif yang digagas oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Siklus analisis ini mensyaratkan pergerakan iteratif melalui empat tahapan simultan: tahapan pengumpulan data intensif, reduksi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta bermuara pada penarikan kesimpulan dan verifikasi temuan. Tahap reduksi data beroperasi sebagai proses filterisasi kritis untuk merangkum, memilih inti sari permasalahan, dan mengeliminasi informasi *noise* yang bias fokus, sehingga agregasi data yang tersisa terpusat tajam pada fokus kajian strategi. Selanjutnya, matriks data yang telah direduksi tersebut dikonstruksi ke dalam wujud penyajian data (*data display*) berbentuk narasi teks deskriptif yang analitis, guna membedah relasi kausalitas antar fenomena secara lebih terstruktur dan koheren. Pada etape akhir pengerjaan, dilakukan formulasi penarikan kesimpulan secara bertahap dan dialektis. Temuan-temuan awal yang bersifat tentatif akan terus digodok dan diverifikasi kedalamannya seiring bertambahnya pasokan data di lapangan, hingga bermuara pada kesimpulan final yang kokoh mengenai efektivitas strategi Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang.

Secara spasial, riset ini menancapkan lokus utamanya di instansi birokrasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang, yang diintensifkan dengan penjelajahan teritorial ke beberapa sentra dapur operasional UMKM pempek di wilayah Kota Palembang sebagai lokus pendukung validasi silang. Pemilihan lokus definitif ini merupakan sebuah keharusan demografis dan historis, mengingat entitas Kota Palembang memegang status primer sebagai tanah kelahiran orisinal dari pempek sekaligus menjadi pusaran ekosistem aktivitas UMKM kuliner tersebut, yang diestimasi menyimpan cadangan potensi perputaran roda ekonomi yang amat eksponensial. Dari dimensi proyeksional waktu, kerangka investigasi akademik ini dirancang untuk dilaksanakan selama kurun durasi efektif dua bulan penuh, yakni membentang dari bulan Maret hingga April 2026. Interval waktu strategis tersebut diformulasikan untuk mewadahi ragam aktivitas hulu-hilir penelitian, mulai dari giat observasi prasurvei awal, intensifikasi pemungutan data primer, penyelenggaraan wawancara eksklusif, ekstraksi arsip dokumentasi institusi, hingga masuk pada ruang kontemplasi analisis penyusunan konklusi. Melalui investasi rentang waktu tersebut, diyakini bahwa anatomi kajian ini memiliki landasan pijak yang cukup kokoh guna membingkai dan memotret potret kondisi faktual secara tajam, mendalam, serta sangat kontekstual.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti melakukan analisis mendalam mengenai Strategi Dinas Koperasi dan UKM dalam Pengembangan UMKM Pempek di Kota Palembang dengan menggunakan landasan konseptual manajemen strategi yang digagas oleh Wheelen dan Hunger (Pearce & Robinson, 2014). Dalam perspektif teoritis ini, efektivitas strategi suatu organisasi tidak dapat dinilai secara parsial, melainkan harus ditelaah melalui siklus utuh sistemik yang terdiri atas empat dimensi interdependen, yaitu pengamatan lingkungan (environmental scanning), perumusan strategi (strategy formulation), implementasi strategi (strategy implementation), serta evaluasi dan pengendalian (evaluation and control). Keempat dimensi strategis tersebut dioperasionalkan sebagai pisau analisis untuk membedah instrumen kebijakan, kapabilitas birokrasi, serta sejauh mana intervensi pemerintah daerah mampu bertindak sebagai katalisator yang adaptif dalam mendongkrak daya saing ekosistem UMKM pempek di Kota Palembang.

3.1 Pengamatan Lingkungan (*Environmental Scanning*)

Peneliti melakukan pengukuran terhadap dimensi pengamatan lingkungan melalui aktivitas identifikasi dan pemetaan komprehensif terhadap kondisi internal (kekuatan dan kelemahan institusi) serta kondisi eksternal (peluang dan ancaman pasar) yang secara makro maupun mikro memengaruhi arah pengembangan UMKM pempek di Kota Palembang. Pengamatan ekologi organisasi ini krusial dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM agar perumusan kebijakan publik yang dihasilkan tidak bersifat menerawang (*guesswork*), melainkan berbasis pada data faktual mengenai potensi riil, dinamika peluang pasar, tantangan kompetisi, serta kebutuhan riil para pelaku usaha di akar rumput.

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang intensif, sektor UMKM pempek di Kota Palembang terbukti memiliki basis potensi ekonomi yang sangat masif dan prospektif karena komoditas pempek bukan lagi sekadar produk panganan fungsional, melainkan telah bermutasi menjadi produk kuliner khas yang melekat kuat sebagai identitas kultural daerah. Secara sosiologis dan ekonomi, tingginya permintaan pasar yang bersifat konstan baik dari ceruk pasar domestik lokal maupun limpahan pasar luar daerah membuka ruang eskalasi usaha yang sangat menjanjikan bagi kemandirian ekonomi masyarakat. Ditambah lagi, arus disrupsi teknologi di era revolusi industri gelombang baru membawa angin segar berupa pemanfaatan teknologi digital, yang membuka peluang emas bagi pelaku UMKM lokal untuk memotong rantai distribusi konvensional dan memperluas penetrasi pasar global melalui platform *e-commerce* serta pemasaran digital. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara eksklusif bersama Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang yang menegaskan komitmen birokrasi sebagai berikut "Pempek merupakan salah satu produk unggulan Kota Palembang sehingga pemerintah terus melakukan pemetaan kondisi UMKM agar program pembinaan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha."

Pernyataan dari pucuk pimpinan instansi tersebut memberikan legitimasi bahwa secara administratif-normatif, pemerintah daerah telah menunjukkan itikad strategis (*strategic intent*) untuk proaktif mengidentifikasi variabel kebutuhan pelaku UMKM sebagai batu pijakan perancangan program

kerja. Namun demikian, apabila realitas kebijakan ditakar menggunakan pendekatan audit lapangan yang kritis, peneliti masih menemukan kesenjangan (*gap*) struktural yang menjadi batu sandungan. Di lapangan, para pelaku UMKM pempek masih terjebak dalam pusaran problem klasik, mulai dari hambatan keterbatasan akses pembiayaan modal formal, rendahnya literasi digital akibat kesenjangan pemahaman teknologi, minimnya diferensiasi dan inovasi produk, hingga rapuhnya tata kelola manajemen internal usaha. Implikasinya, mayoritas pelaku UMKM berskala mikro dan kecil masih menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada corak pemasaran konvensional, sehingga akselerasi jangkauan pasar mereka berjalan lambat dan belum mampu berekspansi secara maksimal.

Dari sisi dokumentasi kegiatan, terekam bahwa Dinas Koperasi dan UKM telah mengupayakan pengumpulan basis data secara periodik melalui agenda pendataan dan pembinaan berkala. Upaya ini mencerminkan fungsi pemerintah sebagai regulator dan fasilitator dalam memantau denyut nadi ekonomi masyarakat. Melalui agregasi temuan di atas, peneliti menarik konklusi bahwa fase pengamatan lingkungan oleh dinas terkait telah dieksekusi dengan cukup memadai karena birokrasi mampu memetakan spektrum potensi dan problematika UMKM pempek. Meskipun begitu, efektivitas tahapan ini tetap memerlukan penguatan jangkauan instrumen pendataan yang lebih mutakhir, terintegrasi, dan komprehensif agar tidak ada pelaku usaha potensial yang tereliminasi dari basis data pembinaan.

3.2 Perumusan Strategi (*Strategy Formulation*)

Peneliti melakukan pengukuran terhadap dimensi perumusan strategi dengan menelisik kualitas proses teknis penyusunan masterplan kebijakan, desain program kerja jangka pendek-menengah, serta pilihan langkah-langkah taktis yang diformulasikan oleh pemerintah daerah dalam menavigasi arah masa depan UMKM pempek. Formulasi strategi yang kokoh mengharuskan adanya sinkronisasi antara kapabilitas internal birokrasi dengan tuntutan lingkungan eksternal agar tercipta nilai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan bagi daerah. Mengacu pada hasil wawancara mendalam dengan Kepala Bidang UMKM, diperoleh penjelasan mengenai diversifikasi intervensi yang dirancang oleh dinas "Strategi yang dilakukan tidak hanya berupa bantuan modal tetapi juga pelatihan usaha, promosi produk, peningkatan kualitas produk, serta pendampingan digital marketing."

Pemaparan tersebut mengindikasikan bahwa lanskap pemikiran para perencana kebijakan di tingkat dinas telah bergerak maju dan menyadari bahwa problem UMKM tidak bisa diselesaikan secara simplistis hanya melalui injeksi modal material semata, melainkan harus menyentuh ranah peningkatan kapasitas manajerial (*capacity building*). Berdasarkan telaah dokumen resmi dan rencana strategis Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang, cetak biru strategi pemberdayaan yang telah diformulasikan dijabarkan ke dalam enam klaster program utama, meliputi:

1. Penyelenggaraan pelatihan tata kelola manajemen usaha secara profesional;
2. Edukasi dan pelatihan intensif pemasaran digital (*digital marketing*);
3. Fasilitasi pengurusan legalitas usaha (NIB, PIRT) secara terpadu;
4. Pendampingan jaminan mutu melalui sertifikasi halal dan standardisasi

produk;
5. Penguatan perluasan pasar melalui fasilitasi keikutsertaan dalam pameran UMKM; serta
6. Penyediaan skema bantuan dan fasilitasi akses permodalan perbankan.

Secara konseptual, pembagian klaster program tersebut menunjukkan bahwa arsitektur strategi yang dirancang telah berupaya mengadaptasi kebutuhan riil para pelaku usaha agar siap bertarung di era ekonomi digital. Namun, sisi lemah dari perumusan strategi ini terkuak ketika peneliti melakukan konfirmasi ke tingkat akar rumput. Peneliti menemukan kenyataan pahit bahwa arus penyebaran informasi program kerja pemerintah belum terdistribusi secara merata. Banyak pelaku UMKM pempek berskala mikro di sudut-sudut kota yang mengaku buta informasi dan belum mengetahui keberadaan program-program afirmatif tersebut, yang mengindikasikan adanya disfungsi pada saluran sosialisasi birokrasi.

Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa dimensi perumusan strategi pada dasarnya telah dikonseptualisasikan dengan cukup matang melalui ragam variasi program pemberdayaan masyarakat. Namun, efisiensi dari dokumen strategi tersebut masih tereduksi oleh lemahnya aspek pengorganisasian informasi dan pemerataan sosialisasi, sehingga membutuhkan rekonstruksi sistem komunikasi publik yang lebih inklusif.

3.3 Implementasi Strategi (*Strategy Implementation*)

Peneliti melakukan pengukuran terhadap dimensi implementasi strategi dengan melihat realisasi konkret, eksekusi operasional, serta dinamika penyerapan program pengembangan UMKM pempek yang diturunkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang ke lapangan. Tahap implementasi merupakan ujian krusial di mana keandalan dokumen rencana diuji oleh realitas birokrasi, ketersediaan sumber daya, serta respons sosiologis dari target sasaran kebijakan.

Dari hasil observasi yang dilakukan, manifestasi dari implementasi strategi ini mewujud dalam pelaksanaan berbagai agenda padat karya ilmiah populer seperti kursus pelatihan teknis, pendampingan melekat di sentra produksi, serta fasilitasi ajang promosi komoditas UMKM. Indikator keberhasilan parsial dari implementasi ini terekam lewat testimoni jujur salah satu pelaku usaha pempek yang menyatakan "Kami pernah mengikuti pelatihan pemasaran digital dan cukup membantu dalam memperluas promosi usaha melalui media sosial."

Pengakuan empiris tersebut menjadi bukti otentik bahwa intervensi kebijakan yang dieksekusi oleh pemerintah daerah bukan sekadar formalitas, melainkan mampu memberikan suntikan nilai tambah (*added value*) fungsional yang dirasakan langsung manfaatnya oleh pelaku usaha dalam menaikkan omzet penjualan digital mereka. Kesaksian ini disinkronkan dengan bukti-bukti dokumentasi administratif yang memperlihatkan visualisasi aktivitas bazar produk, lokakarya teknik pengemasan kedap udara (*vacuum packaging*), serta pendampingan klinis manajemen usaha.

Meskipun membuahkan hasil positif di beberapa lini, observasi mendalam peneliti menemukan adanya *bottleneck* (penyumbatan) operasional yang masif saat implementasi berlangsung. Sebagian besar komunitas pelaku UMKM pempek mengeluhkan ketidakmampuan mereka untuk berpartisipasi

secara konsisten dan rutin dalam program pembinaan pemerintah. Kendala utama dipicu oleh faktor kehabisan alokasi waktu operasional harian, keterisolasian akses informasi jadwal kegiatan, hingga keterbatasan daya tampung (*capacity constraint*) kuota peserta pelatihan yang disediakan dinas.

Dampak lanjutannya adalah terjadinya ketimpangan jangkauan kebijakan, di mana pelaksanaan program pemberdayaan belum mampu menyentuh keseluruhan populasi pelaku UMKM pempek secara proporsional dan merata. Kondisi ini menyisakan kantong-kantong pengrajin pempek tradisional di wilayah pinggiran yang belum tersentuh pembinaan secara optimal. Atas dasar analisis data lapangan tersebut, implementasi strategi dinilai telah berjalan di koridor yang benar, namun masih tertatih-tatih akibat keterbatasan daya jangkau operasional dan rasio tenaga pendamping lapangan yang timpang.

3.4 Evaluasi dan Pengendalian (*Evaluation and Control*)

Peneliti melakukan pengukuran terhadap dimensi evaluasi dan pengendalian dengan menelisik ketersediaan mekanisme instrumen penjaminan mutu, pengawasan internal, serta ketatnya sistem penilaian berkala terhadap dampak pelaksanaan program pengembangan UMKM pempek. Evaluasi dalam administrasi publik berfungsi sebagai kompas korektif untuk memastikan bahwa penggunaan uang negara (*public fund*) benar-benar melahirkan perubahan kondisi subjek ke arah yang lebih sejahtera. Merujuk pada hasil wawancara dengan jajaran pejabat teknis Dinas Koperasi dan UKM, diperoleh keterangan formal mengenai prosedur pengawasan yang berjalan "Evaluasi dilakukan melalui monitoring kegiatan dan melihat perkembangan usaha pelaku UMKM setelah mengikuti program pembinaan." Kutipan normatif tersebut mengindikasikan bahwa birokrasi telah menyediakan instrumen monitoring guna mengawal akuntabilitas pelaksanaan program di lapangan.

Melalui verifikasi data lewat observasi partisipatif, peneliti mendapati bahwa praktik evaluasi yang dijalankan dinas sejauh ini diwujudkan melalui pengisian absensi kehadiran lokakarya, peninjauan acak (*sampling survey*) ke beberapa ruko mitra binaan, serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sayangnya, temuan kritis peneliti menunjukkan bahwa mekanisme evaluasi tersebut masih terjebak dalam "jebakan administratif" (*administrative trap*). Pengukuran kinerja yang dilakukan cenderung bias pada pemenuhan target-target output kuantitatif formal (seperti jumlah pelatihan yang terlaksana atau jumlah sertifikat yang dicetak), dan mengabaikan pengukuran mendalam terhadap variabel dampak jangka panjang (*outcome/impact tracking*) bagi ketahanan ekonomi pelaku usaha.

Kelemahan fatal ini diperkuat oleh bukti-bukti dokumen internal dinas yang menunjukkan ketiadaan indikator keberhasilan (*Key Performance Indicators*) yang rigid, spesifik, dan terukur untuk mendeteksi fluktuasi riil pendapatan pelaku usaha, persentase perluasan koordinat pasar, maupun peningkatan grafik daya saing produk secara makro. Alhasil, peneliti menarik kesimpulan bahwa dimensi evaluasi dan pengendalian telah dilembagakan oleh instansi birokrasi, namun masih bersifat mekanistis-formalitas. Diperlukan reformasi radikal pada sistem evaluasi agar berorientasi pada keberlanjutan dampak ekonomi secara jangka panjang

(*sustainable development*).

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Riset ini menyingkap tabir empiris bahwa orkestrasi strategi Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang dalam memacu pertumbuhan UMKM pempek telah mengadopsi empat tahapan sirkular teori manajemen strategi Wheelen dan Hunger, yang meliputi pengamatan lingkungan, perumusan, implementasi, hingga evaluasi dan pengendalian. Konvergensi temuan ini memunculkan diskursus akademik yang menarik ketika dibenturkan dengan berbagai literatur terdahulu.

Sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya bahwa UMKM pempek memiliki kontribusi yang sangat vital dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Oktaria et al. (2025) . Temuan ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya karena riset ini mengonfirmasi realitas di lapangan bahwa pelaku UMKM pempek memang masih terus dihadapkan pada rentetan tantangan struktural yang sama, yakni pada aspek permodalan, jaringan distribusi, dan keharusan inovasi produk agar dapat bertahan di tengah pasar bebas. Akan tetapi, penelitian ini menarik benang merah yang lebih jauh ke ranah hulu, yakni menyoroti bahwa tantangan tersebut tidak akan terurai tanpa adanya intervensi dari tata kelola birokrasi pemerintahan sebagai fasilitator utama.

Di sisi lain, terdapat pergeseran analisis pada tahap evaluasi dan efektivitas intervensi. Berbeda dengan temuan penelitian Ramadani et al. (2025) bahwa pemberdayaan UMKM pempek dapat diakselerasi secara swadaya hanya melalui penguatan media promosi dan pengembangan identitas usaha secara mikro pada satu objek usaha. Temuan penelitian ini justru menemukan bahwa pada skala makro (kebijakan publik), sebaik apapun program promosi yang dirancang oleh institusi pembina, tahap implementasi dan evaluasinya kerap mengalami kendala. Kelemahan utama yang ditemukan dalam riset ini adalah belum maksimalnya pembinaan akibat keterbatasan jumlah SDM tenaga pendamping lapangan dan alokasi anggaran dari pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang. Evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah masih cenderung bersifat administratif dan belum menyentuh aspek pendampingan pasca-program (*hand-holding*).

Lebih lanjut, keberhasilan eskalasi skala bisnis UMKM pempek mutlak mensyaratkan sinergi. Sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya dari Muhamad & Hardini (2025) bahwa adaptasi strategi, inovasi produk, serta konsistensi pelayanan adalah kunci utama bagi UMKM pempek untuk bertahan di era persaingan ketat Kota Palembang. Temuan ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya karena program pembinaan dari dinas yang ditemukan di lapangan, seperti pelatihan standardisasi HACCP dan bantuan peralatan produksi modern (mesin *vacuum*, *grinder*, dan *freezer*), merupakan wujud nyata fasilitasi pemerintah untuk mendorong inovasi dan adaptasi kualitas tersebut. Namun, riset ini memperluas diskursus Muhamad & Hardini dengan menemukan urgensi kolaborasi struktural yang lebih holistik. Peningkatan status UMKM tidak cukup

hanya mengandalkan inisiatif pelaku usaha tunggal, melainkan menuntut koordinasi antar-*stakeholder* yang intensif pada tahap implementasi kebijakan daerah.

Selanjutnya, berbeda dengan temuan penelitian Aliyah (2025) bahwa peningkatan UMKM pempek (dalam hal ini pempek rajungan) lebih ditekankan pada peran tata kelola *manajemen strategik berbasis digital* di tingkat internal pelaku usaha perdesaan, penelitian ini meletakkan locus analisis manajemen strategis pada entitas birokrasinya (Dinas Koperasi dan UKM). Namun secara prinsip, temuan di Kota Palembang ini tetap menyelaraskan diri dengan gagasan Aliyah bahwa tanpa perumusan visi yang jelas dan terarah, pengembangan sektor pempek akan kehilangan kompas. Saat ini, visi dari Dinas sudah jelas, namun kelemahannya adalah masih bersifat terlalu umum dan belum memiliki spesifikasi khusus untuk penanganan sektor kuliner pempek.

Terakhir, dan yang paling fundamental secara konseptual, temuan ini menolak penelitian sebelumnya dari Dhanti et al. (2023) karena perbedaan karakteristik objek penelitian dan fokus kebijakan. Dhanti et al. (2023) dalam tinjauan *Maqashid Syariah*-nya menyimpulkan bahwa program penyaluran dana bantuan pemerintah (injeksi modal finansial) adalah instrumen paling krusial dalam mendukung kelangsungan kesejahteraan UMKM pempek. Temuan lapangan dalam penelitian ini secara tegas menolak simplifikasi yang mendewakan bantuan uang tunai (karitatif) tersebut. Di era persaingan ekonomi modern Kota Palembang saat ini, intervensi yang paling dibutuhkan oleh UMKM pempek agar dapat "naik kelas" secara mandiri bukanlah semata-mata kepemilikan modal uang, melainkan penciptaan ekosistem melalui sistem inkubasi bisnis yang berkelanjutan dan peningkatan rasio tenaga pendamping ahli. Birokrasi pemerintahan masa kini dituntut untuk bergeser dari paradigma pemberi bantuan pasif (*top-down controller*) menjadi fasilitator dan katalisator yang memandirikan daya juang masyarakat secara sistemik.

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Sepanjang petualangan ilmiah di lokus penelitian, peneliti berhasil mengidentifikasi beberapa anomali fenomena empiris yang sangat memikat untuk didiskusikan secara mendalam. Salah satu fenomena sosiologis yang menonjol adalah terjadinya lonjakan kesadaran kolektif secara organik di kalangan pengrajin pempek tradisional untuk mulai bermigrasi memanfaatkan kanal-kanal media digital sebagai instrumen pemasaran produk mereka. Walaupun dari aspek teknis operasional pemanfaatannya masih jauh dari kata mahir dan belum optimal, munculnya motivasi internal (*internal drive*) ini merupakan modal sosial (*social capital*) yang sangat berharga untuk mempermudah penetrasi kebijakan digitalisasi pemerintah di masa depan.

Temuan menarik berikutnya yang berhasil diungkap adalah vitalnya peran strategis organisasi agregator pelaku usaha, salah satunya seperti ASPPEK (Asosiasi Pengusaha Pempek Palembang). Komunitas ini terbukti mampu menjelma menjadi lembaga perantara (*intermediary institution*) yang efektif untuk menjembatani jurang komunikasi, memperkecil asimetri informasi antara elite birokrasi dinas dengan pelaku usaha kecil, sekaligus memperkokoh jalinan

kemitraan bisnis antar-anggota.

Terakhir, jalinan analisis peneliti membuktikan bahwa karakteristik intrinsik dari komoditas pempek yang berstatus ganda, yaitu sebagai produk kuliner komersial sekaligus produk kebudayaan bernilai historis, memberikan suntikan nilai ekonomi yang khas. Selain menyumbang angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pempek menyimpan magnet magis berupa nilai kebanggaan daerah (*regional pride*) yang berpotensi melipatgandakan daya tarik sektor industri pariwisata dan ekonomi kreatif Kota Palembang. Konklusi teoritis dari fenomena ini menegaskan bahwa kebijakan pengembangan UMKM pempek tidak boleh diisolasi hanya dalam dimensi urusan ekonomi an sich, melainkan harus diintegrasikan dalam grand-design pelestarian warisan budaya lokal yang bernilai ekonomi tinggi.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa strategi Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang dalam pengembangan UMKM pempek telah berjalan cukup baik melalui tahapan pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian. Strategi yang dilakukan diwujudkan melalui berbagai program seperti pelatihan usaha, pendampingan, promosi produk, serta fasilitasi pengembangan usaha. Pelaksanaan strategi tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam mendukung peningkatan kapasitas pelaku UMKM pempek, meskipun masih diperlukan optimalisasi pada aspek pemerataan pelaksanaan program, sosialisasi informasi, dan evaluasi program secara berkelanjutan.

Guna meningkatkan efektivitas strategi pengembangan UMKM pempek, disarankan agar pemerintah lebih mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan pemasaran digital, memperluas jangkauan pembinaan kepada seluruh pelaku usaha, serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak seperti komunitas usaha, sektor swasta, dan lembaga terkait dalam mendukung pengembangan UMKM secara berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan utama pada waktu dan cakupan penelitian yang relatif terbatas. Penelitian hanya dilakukan pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang serta beberapa pelaku UMKM pempek sehingga hasil penelitian belum menggambarkan keseluruhan kondisi UMKM kuliner secara luas di Kota Palembang.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan sehingga diperlukan penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas. Penelitian berikutnya disarankan dapat mengkaji strategi pengembangan UMKM pada sektor kuliner lainnya atau menggunakan pendekatan penelitian berbeda sehingga diperoleh hasil yang lebih mendalam mengenai pengembangan UMKM berbasis potensi lokal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang beserta seluruh jajaran yang telah memberikan kesempatan dan membantu pelaksanaan penelitian. Ucapan terima kasih juga

disampaikan kepada seluruh pelaku UMKM pempek, informan penelitian, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan membantu kelancaran proses penelitian hingga penyusunan penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kota Palembang. (2024). *Palembang dalam angka 2024*. https://palembangkota.bps.go.id

Bhalla, N., Sharma, R. K., & Kaur, I. (2023). Effect of goods and service tax system on business performance of micro, small and medium enterprises. *SAGE Open, 13*(2), 1–17. https://doi.org/10.1177/21582440231177210

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang. (2024). *Profil dan program kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang*. https://diskopukm.palembang.go.id

Ernawati, D. P., & Laily, N. (2020). The effect of knowledge sharing and innovation behavior on the performance of batik entrepreneurs. *Jurnal Manajemen, 24*(2), 194–209. https://doi.org/10.24912/jm.v24i2.643

Fadly, M., Supriatna, T., Mulyati, D., & Simangunsong, F. (2018). The local government strategy in sub-district development as the center of economic development with one sub-district one product based at Mukomuko region in Bengkulu Province. *Journal of Public Administration and Governance, 8*(3), 374–387. https://doi.org/10.5296/jpag.v8i3.13545

Favoreu, C., Carassus, D., & Maurel, C. (2016). Strategic management in the public sector: A rational, political or collaborative approach? *International Review of Administrative Sciences, 82*(3), 435–453. https://doi.org/10.1177/0020852315578410

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2024). *Data dan statistik UMKM Indonesia*. https://kemenkopukm.go.id

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.

Nawawi, H. (2012). *Manajemen strategik organisasi non profit bidang pemerintahan (dengan ilustrasi di bidang pendidikan)*. Gadjah Mada University Press.

Ossowska, L., Janiszewska, D., Kwiatkowski, G., & Oklevik, O. (2024). Local food production based on culinary heritage—A way to local sustainability. *Sustainability, 16*(24), 11310. https://doi.org/10.3390/su162411310

Pearce, J. A., & Robinson, R. B. (2014). *Manajemen strategis: Formulasi, implementasi, dan pengendalian* (N. Pramita, Trans.). Salemba Empat.

Sitompul, S. S., Wasistiono, S., & Simangunsong, F. (2021). Manajemen strategis pemerintah daerah dalam pengelolaan aset tanah dan bangunan Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. *Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia, 13*(3), 607–620. https://doi.org/10.54783/jv.v13i3.479

Taiminen, H. M., & Karjaluoto, H. (2015). The usage of digital marketing channels in SMEs. *Journal of Small Business and Enterprise Development, 22*(4), 633–651. https://doi.org/10.1108/JSBED-05-2013-0073